



|             |                                      |              |  |
|-------------|--------------------------------------|--------------|--|
| Media Title | Investor Daily                       |              |  |
| Head Line   | Realisasi Dana Land Capping Rp2,52 T |              |  |
| Date        | 6 Mar 2014                           | Color        |  |
| Section     | News                                 | Circulation  |  |
| Page No     | 6                                    | Article Size |  |
| Journalist  | ean                                  | Advalue      |  |
| Frequency   | Daily                                | PR Value     |  |

## Realisasi Dana Land Capping Rp 2,52 T

JAKARTA – Total realisasi penyerapan dana pembebasan lahan melalui *land capping* hingga akhir 2013 mencapai Rp 2,52 triliun dari alokasi daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) yang direvisi sebesar Rp 4,56 triliun. Dengan demikian, sisa dana *land capping* sebanyak Rp 2,04 triliun akan dioptimalkan untuk sembilan ruas tol.

Kepala Satuan Kerja *land capping* Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nurdin Abdul Fatah mengungkapkan, realisasi serapan dana *land capping* tahun 2013 tertinggi dibandingkan lima tahun terakhir yang hanya sekitar Rp 200-400 miliar tiap tahun. Adapun serapan tahun 2013 mencapai Rp 947,80 miliar dari DIPA Rp 950 miliar.

"Ini karena badan usaha jalan tol mempercepat proses pembebasan lahan sebelum undang-undang baru diterapkan," papar dia kepada *Investor Daily* di Jakarta, Kamis (6/3).

Pemerintah selalu menganggarkan dana *land capping* sebesar Rp 500 miliar tiap tahun. Akan tetapi, pada tahun ini hanya dialokasikan Rp 300 miliar. Dari alokasi anggaran itu pun belum ada penyerapan pada tahun ini. "Sampai sekarang masih belum ada penyerapan ataupun pengajuan dari badan usaha jalan tol," papar dia.

Adapun pada tahun 2013, pemerintah mengajukan tambahan dana *land capping* sebesar Rp 450 miliar. Pengajuan tambahan dana ini dipicu oleh lonjakan penyerapan dana *land capping* seiring meningkatnya kegiatan pembebasan lahan.

Penambahan dana ini akhirnya disetujui Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2013. Dengan demikian, dana *land capping* tahun 2013 sebesar Rp 950 miliar.

Dari realisasi dana *land capping* 2013, sekitar Rp 412,56 miliar diserap

### Serapan Dana Land Capping

| Ruas Tol            | Pagu Land Capping  | Serapan            |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Semarang-Solo       | Rp 617,27 miliar   | Rp 534,15 miliar   |
| Cinere-Jagorawi     | Rp 1.228,95 miliar | Rp 688,05 miliar   |
| Bogor Ring Road     | Rp 113 miliar      | Rp 105,80 miliar   |
| Kertosono-Mojokerto | Rp 48,19 miliar    | Rp 22,32 miliar    |
| Surabaya-Mojokerto  | Rp 755,71 miliar   | Rp 389,75 miliar   |
| Pejagan-Pemalang    | Rp 51,67 miliar    | Rp 39,16 miliar    |
| Gempol-Pasuruan     | Rp 122,39 miliar   | Rp 49,99 miliar    |
| JORR W2             | Rp 570,08 miliar   | Rp 290,37 miliar   |
| Depok-Antasari      | Rp 1.831,70 miliar | Rp 412,56 miliar   |
| TOTAL               | Rp 5.338,99 miliar | Rp 2.532,17 miliar |

Sumber: Kementerian PU

oleh proyek tol Depok-Antasari, kemudian disusul oleh tol Cinere-Jagorawi Rp 205 miliar, dan tol Surabaya-Mojokerto Rp 174,24 miliar. Sedangkan sisanya diserap oleh tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) Rp 58,18 miliar dan tol Semarang-Solo Rp 32,723 miliar.

Selanjutnya, dana itu juga diserap untuk tol Bogor Ring Road Rp 29,14 miliar, tol Pejagan-Pemalang Rp 26,45 miliar, dan tol Gempol-Pasuruan Rp 9,49 miliar. "Untuk tol Mojokerto-Kertosono tidak menyerap dana *land capping* tahun lalu," ungkap Nurdin.

Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Subagyo mengatakan, dana pengadaan lahan melalui skema *land capping* diberikan pemerintah bila terjadi kenaikan harga lahan dari yang sudah diperkirakan. Apalagi, tiap tahun terjadi kecenderungan harga lahan terus naik. "Kalau dibiarkan, masyarakat pasti minta harga yang lebih tinggi," ujar dia.

Subagyo menuturkan, sisa dana penyerapan *land capping* yang belum diserap diharapkan bisa dikurangkan seluruhnya pada tahun ini. Namun, itu dengan catatan tim pembebasan tanah

dan panita pengadaan tanah mau bekerja cepat, sehingga realisasi bisa cepat.

Dia menambahkan, kebutuhan dana pengadaan lahan seluruh ruas tol di Indonesia mencapai Rp 13,6 triliun pada tahun ini. Dana itu tersebar di tiga pos skema penganggaran pengadaan lahan tol, yaitu melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Rp 2,99 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp 4,7 triliun, dan *land capping* Rp 5,90 triliun.

"Kalau itu dipenuhi (Kemkeu), bisa membebaskan lahan untuk seluruh proyek jalan tol. Namun, kebutuhan dana ini harus proporsional dan tergantung dari kinerja tim pembebasan tanah (TPT), panitia pengadaan tanah (P2T), dan proporsi dari tiga sumber dana itu," papar dia, belum lama ini.

Atas dasar itu, lanjut dia, alokasi dana pengadaan lahan tol pada tahun ini hanya ditetapkan sebesar Rp 1,1 triliun melalui APBN, sekitar Rp 4,8 triliun disediakan melalui BLU di BPJT, dan sekitar Rp 300 miliar melalui skema *land capping*. "Dana yang disediakan ini kami upayakan terserap seluruhnya, dan bila kurang akan dimintakan lagi," ujar dia. (ean)